

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dan diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten ini semuanya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah plagiatisme atau mencontek dari karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar ke sarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 14 November 2018

Ahmad Herli Erdiana
NIM: 131200274

ABSTRAK

Nama : Ahmad Herli Erdiana , NIM :131200274, Judul Skripsi : Kewenangan KPK Melakukan Penyadapan Terhadap Orang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Study Undang-undang KPK No 30 Tahun 2002 dan Hukum Islam)

Upaya KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi melalui penyadapan dari aspek pendekatan Undang-undang ITE No. 11 Tahun 2008 dan Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, demikian pula bila dihubungkan dengan konsep ajaran Islam, perbuatan penyadapan atau mencari kesalahan orang lain adalah dilarang dan sangat jelas tidak diperbolehkan, namun terdapat pengecualian yang bisa dilakukan, jika tindak korupsi tersebut membuat keuangan negara merugi, maka tindakan penyadapan itu perlu dilakukan

Dari permasalahan diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalahnya yaitu : 1. Bagaimana Hukum penyadapan terhadap objek yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang KPK No 30 Tahun 2002 ? 2. Bagaimana Hukum Penyadapan terhadap objek yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menurut hukum Islam? Adapun tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui hukum penyadapan menurut Undang-undang KPK No 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi. 2. Untuk mengetahui hukum penyadapan terhadap objek yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menurut hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan (Library Research) penulisan ini merupakan kegiatan telaah pustaka (Review Research) yaitu penulis membaca, mengutip dan merangkai hal-hal yang perlu merujuk pada buku-buku dan dokumen-dokumen serta berbagai rujukan lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan, dan menggunakan metode kualitatif induktif yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus untuk diolah menjadi kesimpulan yang bersifat umum sehingga penulis memperoleh penjelasan secara terperinci.

Kesimpulannya bahwa penyadapan KPK terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi untuk dijadikan alat bukti bagi tersangka maka perbuatan tersebut dibolehkan oleh perundang undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang KPK No 30 tahun 2002 pada Pasal 12. Namun Penyadapan hakekatnya syari'at Islam tidak membenarkan karena mencari-cari atau mengorek-ngorek kesalahan orang lain adalah perbuatan yang dilarang, tetapi jika yang dimaksudkan untuk kemaslahatan umat termasuk menghentikan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang dikecualikan (dibenarkan) mengingat kaidah kemaslahatan umat harus didahulukan dari kemaslahatan individual.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Pengajuan Munaqasah**
a.n. Ahmad Herli Erdiana
NIM : 131200274

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN “SMH” Banten
Di –
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Ahmad Herli Erdiana**, **NIM: 131200274**, yang berjudul: *“Kewenangan KPK Melakukan Penyadapan Terhadap Orang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Study Undang-undang KPK No 30 Tahun 2002 dan Hukum Islam)”* kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 14 November 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd
NIP. 1956020819992031001

Atu Karomah, SH., MS.i.
NIP. 196902141999032001

PERSETUJUAN

KEWENANGAN KPK MELAKUKAN PENYADAPAN TERHADAP OBJEK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(Study Undang-undang KPK No 30 Tahun 2002 Dan Hukum Islam)

Oleh :

Ahmad Herli Erdiana

NIM: 131200274

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i M.P.d
NIP. 195602081992031001

Atu Karomah SH., M.Si.
NIP. 196902141999032003

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP: 195911191991031003

Dr. H. Muhammad Ishom. MA
NIP: 197606232006041002

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Ahmad Herli Erdiana, NIM: 131200274 yang berjudul: **Kewenangan KPK Melakukan Penyadapan Terhadap Orang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Study Undang-undang KPK No 30 Tahun 2002 dan Hukum Islam)**, telah diajukan dalam Sidang Munaqasah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tanggal 21 November 2018 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Serang, 2018

Sidang Munaqasah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. H. Mahfud, M.M.
Nip. 19620705 199303 1005

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.
Nip. 197103252003121001

Penguji I

Anggota

Penguji II

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.
Nip. 19690906 199603 2 002

Dr. H. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.
Nip. 198408022011011008

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe’i M.P.d
NIP. 19560208 1992031001

Atu Karomah SH., M.Si.
NIP. 19800721 200912 1005

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT

Penulis persembahkan Skripsi yang sederhana ini untuk:

Ayahanda tercinta (*Edih*), Ibunda tercinta (*cucu*) yang telah memberikan sumbangsih kepada penulis baik bersifat moril maupun materil yang tiada ternilai harganya, memberikan semangat motivasi yang tiada henti-henti, dengan segenap rasa bhakti dan kasih sayang dari mereka tercinta kuraih cita-cita.

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(QS. An-Nisa : 59)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lebak pada tanggal 17 November 1995, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Edih dan Cucu yang beralamat di Kp.Cigebrok, Desa. Giriharja Kec. Cipanas Kab. Lebak.

Pendidikan penulis dimulai dengan masuk SDN I Giriharja Tahun 2000 dan lulus tahun ajaran 2006/2007, kemudian masuk SMPN 3 Cipanas Tahun 2007 dan lulus Tahun ajaran 2009/2010, setelah itu melanjutkan ke SMAN 1 Cipanas Tahun 2009 dan lulus Tahun ajaran 2012/2013, Terakhir penulis study di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jurusan Hukum Tata Negara Program S-I.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan. Hanya dengan ijinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada jujungan Nabi Besar Kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir jaman.

Dengan pertolongan Allah dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Kewenangan KPK Melakukan Penyadapan Terhadap Orang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Undang-undang KPK No 30 Tahun 2002 dan Hukum Islam)**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Imam, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.
3. Bapak Dr. H. Ishom, M.A. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i M.Pd Pembimbing I yang telah membimbing memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Atu Karomah S.H., M.Si. sebagai pembimbing II yang telah membimbing memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Rekan-Rekan tercinta dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini
8. Akhirnya hanya kepada Allah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu selesainya skripsi ini semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khasanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin yarobbalamin.

Serang, 14 November 2018

Penulis

Ahmad Herli Erdiana

131200274

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
F. Kerangka Pemikiran.....	11
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penelitian	22
BAB II KEWENANGAN KPK DAN TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Latar Belakang Lahirnya KPK.....	24
B. Tugas Fungsi dan Wewenang KPK	28
C. Pengertian dan Kriteria Tindak Pidana Korupsi	33
D. Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	40

BAB III PENYADAPAN TERHADAP ORANG YANG DIDUGA

MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- A. Standarisasi Penyadapan Terhadap Orang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi..... 42
- B. Sarana dan Media yang Digunakan Penyadapan Terhadap Orang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi..... 46
- C. Ketentuan Melakukan Penyadapan 56

BAB IV HUKUM PENYADAPAN TERHADAP ORANG YANG

DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- A. Hukum Penyadapan Terhadap Orang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang KPK No 30 Tahun 2002..... 59
- B. Hukum Penyadapan Terhadap Orang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam 67

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 78
- B. Saran-saran 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN